

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan masalah penting yang selalu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi lahan yang tidak pasti. Kesejahteraan sosial ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup suatu masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Midgley dalam Fahrudin, A (2018), kesejahteraan sosial mencakup dari berbagai aspek ketika seseorang memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan hidupnya seperti pangan, papan, sekolah, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, akses terhadap pendidikan, keberlanjutan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang memberikan stabilitas dan keamanan. Namun, faktor-faktor eksternal sering kali memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat, seperti status kepemilikan lahan tempat mereka tinggal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Ridwan (2019) menemukan bahwa konflik sosial dan ekonomi sering terjadi karena ketidakpastian kepemilikan lahan, terutama di tanah milik negara atau perusahaan seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Karena masyarakat yang tinggal di atas lahan tanpa hak milik yang jelas merasa tidak memiliki kontrol dan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati ketidakpastian ini dapat menghambat pembangunan sosial. Akibatnya, mereka merasa terbatas dalam berinvestasi dan mengembangkan potensi lahan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kepemilikan tanah tidak hanya merupakan status hukum; itu juga merupakan dasar yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kepastian kepemilikan lahan dianggap penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan lahan dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menghindari konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan.

Pemilikan lahan dianggap sebagai komponen penting dari kesejahteraan sosial dalam kebijakan agraria. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akses ke lahan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, lahan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional seperti PT. Kereta Api Indonesia tidak dapat dialihkan secara hukum kepada penduduk yang tinggal di sana, yang menciptakan

ketimpangan yang signifikan antara kepemilikan legal dan penggunaan lahan. Data agraria menunjukkan bahwa ketidakpastian hak guna tanah berdampak langsung pada kesejahteraan karena menghambat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan seperti kredit yang memerlukan bangunan tanah dari PT. Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah. Menurut laporan tahunan PT. Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah, lahan yang ditempati secara informal oleh masyarakat menghalangi perencanaan infrastruktur dan perbaikan jalur kereta api.

Menurut data PT. Kereta Api Indonesia, sekitar ribuan hektar lahan dihuni tanpa izin resmi. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga advokasi hak asasi manusia telah melakukan banyak penelitian tentang konflik pertanahan, terutama di lahan yang dimiliki oleh BUMN seperti PT. Kereta Api Indonesia. Menurut laporan mereka, konflik lahan mengganggu kesejahteraan sosial karena adanya ancaman penggusuran dan kurangnya kompensasi. Selain itu, laporan ini menekankan betapa pentingnya kebijakan yang inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi hak BUMN atas tanah mereka.

Di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, terdapat sekelompok orang yang tinggal di atas lahan milik PT. Kereta Api Indonesia. Lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sering kali dihuni oleh masyarakat yang menempati lahan tersebut tanpa status kepemilikan resmi. Mereka tinggal di atas lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sebagai penyewa atau bahkan secara informal. Masyarakat yang tinggal di tanah PT. Kereta Api Indonesia seringkali berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Hal ini karena kurangnya kepemilikan tanah berdampak pada berbagai aspek kesejahteraan sosial, seperti akses ke fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih, serta akses ke Pendidikan, ekonomi, lingkungan dan layanan kesehatan.

Menurut Suharto dalam Fahrudin, A (2018), kesejahteraan sosial mencakup aspek tidak hanya ekonomi tetapi juga komponen sosial, psikologis, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan. Masyarakat yang tinggal di tanah PT. Kereta Api Indonesia seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke berbagai program sosial karena ketidakpastian tentang status hukum tanah mereka. Keterbatasan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah, kredit perbankan, dan layanan sosial lainnya termasuk dalam hal ini. Selain itu,

masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menghadapi kebutuhan sandang pangan papannya kurang terpenuhi, pekerjaan masyarakat sekitar hanya buruh pabrik, pengamen, tukang parkir, pedagang di pasar, kuli bangunan, kuli pasar, dan beresiko penggusuran yang tinggi, yang membuat mereka tidak merasa aman dan nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan mental mereka karena ketakutan kehilangan tempat tinggal dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan dan kesehatan fisik karena kurangnya asupan makanan yang sehat dan bergizi.

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Titmuss dalam Fahrudin, A (2018), kesejahteraan sosial juga sangat bergantung pada kemampuan suatu masyarakat untuk mengakses pelayanan sosial dasar. Masyarakat yang tinggal di atas tanah PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi sering mengalami kesulitan mengakses fasilitas umum seperti jaringan air bersih, infrastruktur jalan yang memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena pemerintah dan PT. Kereta Api Indonesia tidak memperhatikan penyediaan fasilitas yang cukup di wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa Sarimahi tidak hanya menghadapi masalah ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengalami marginalisasi sosial, yang menyebabkan kondisi kesehatan mereka menjadi lebih buruk. Dalam situasi seperti ini, status lahan yang tidak pasti dapat dianggap sebagai salah satu komponen struktural yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial.

Oleh karena itu, peneliti mengambil pendekatan ini untuk menyelidiki bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sarimahi dipengaruhi oleh ketidakpastian kepemilikan lahan. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal dilahan PT. Kereta Api Indonesia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, interaksi sosial, lingkungan, kondisi tempat tinggalnya, alasan dan faktor mereka bertempat tinggal di lahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih berfokus pada masyarakat yang tinggal di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya kepastian hukum

dalam kepemilikan lahan dan memberikan wawasan mengenai kesejahteraan sosial masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi?
2. Bagaimana pendidikan masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi?
3. Bagaimana perekonomian masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi?
4. Bagaimana lingkungan dan kondisi rumah masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi.
2. Untuk mengetahui pendidikan masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi.
3. Untuk mengetahui ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi.
4. Untuk mengetahui lingkungan dan kondisi rumah masyarakat yang bertempat tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun rincian manfaat penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Manfaat dan Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memperkuat atau menambah ide baru pada teori kesejahteraan sosial. Dengan melihat secara khusus bagaimana ketidakpastian kepemilikan lahan berdampak pada elemen kesejahteraan sosial masyarakat, seperti keamanan ekonomi, stabilitas psikologis, dan kualitas hidup mereka dalam konteks sosial-ekonomi tertentu. Penelitian ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan teori ilmu sosial dan ekonomi agraria, khususnya mengenai hubungan antara kepemilikan lahan dan kesejahteraan sosial. Hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana status kepemilikan lahan memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat yang tinggal di tanah yang dimiliki oleh perusahaan atau pemerintah.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan pengelola wilayah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Sarimahi. Dengan mengetahui dampak ketidakpastian kepemilikan lahan, pemerintah dapat merencanakan peningkatan akses masyarakat yang terdampak ke pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Penelitian ini juga dapat membantu PT. Kereta Api Indonesia dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kebutuhan orang-orang yang tinggal di tanahnya. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu PT. Kereta Api Indonesia membuat rencana pengendalian konflik lahan yang lebih baik, termasuk pemindahan, opsi untuk ganti rugi, atau kolaborasi yang mempertimbangkan kesejahteraan sosial.

E. Kerangka Berpikir

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan masyarakat, yang mencakup upaya meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta penciptaan lingkungan

sosial yang aman dan nyaman. Dalam konteks masyarakat yang tinggal di atas lahan milik PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, konsep kesejahteraan sosial menjadi relevan untuk diteliti karena berbagai permasalahan yang muncul akibat ketidakjelasan status lahan yang mereka tempati.

Masyarakat Desa Sarimahi yang bermukim di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia menghadapi faktor awal berupa ketidakpastian kepemilikan lahan. Ketidakjelasan status hukum ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Kondisi ini menjadi hambatan struktural dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Suharto dalam Fahrudin, A (2018) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial meliputi aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan.

Profil sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia menunjukkan bahwa mereka mayoritas berasal dari golongan berpenghasilan rendah. Tinggal di kawasan informal ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta lingkungan hidup yang layak. Fenomena ini serupa dengan kondisi yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, di mana lahan-lahan seperti bantaran sungai, rel kereta api, dan lahan kosong digunakan sebagai permukiman oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh T.H. Marshall dalam Fahrudin, A (2018) digunakan sebagai alat analisis. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak sosial seperti hak atas kesehatan, pendidikan, keamanan sosial, ekonomi, lingkungan yang layak, serta perlindungan psikologis sebagai indikator kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sarimahi akan dikaji melalui pemenuhan enam aspek utama: Ekonomi ialah mencakup pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan yang tersedia, serta ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian lahan, sosial ialah meliputi solidaritas komunitas, hubungan antar warga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, pendidikan ialah menilai akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan yang diterima, serta

hambatan administratif akibat status kependudukan , kesehatan ialah mengkaji akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, kondisi sanitasi, air bersih, serta dampak kesehatan lingkungan, lingkungan tempat tinggal ialah menilai kelayakan infrastruktur dasar, kondisi rumah, lingkungan sosial, serta potensi risiko bencana, dan psikologi (rasa aman) ialah berkaitan dengan perasaan aman, stabilitas emosional, tingkat stres, serta kecemasan akibat ketidakpastian tempat tinggal (Fahrudin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Sarimahi, apakah sudah terpenuhi atau masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi kebijakan akan disusun untuk pemerintah, PT. Kereta Api Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketidakpastian kepemilikan lahan yang dialami masyarakat Desa Sarimahi bukan hanya berdampak secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian sosial yang memperburuk kesejahteraan komunitas. Masyarakat menjadi ragu dalam mengambil keputusan jangka panjang, seperti memperbaiki rumah atau membangun usaha baru, karena ancaman penggusuran selalu membayangi. Hal ini memperlemah semangat kolektif dan memperparah kondisi kemiskinan struktural di kawasan tersebut.

Dari sisi sosial, kohesi antar warga tetap terjaga karena adanya kebutuhan untuk saling mendukung dalam situasi sulit. Solidaritas komunitas menjadi kunci dalam mempertahankan kehidupan sehari-hari, meskipun di sisi lain, keterbatasan akses terhadap layanan publik menyebabkan isolasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara kekuatan komunitas internal dan eksklusi dari sistem sosial yang lebih luas.

Dalam aspek pendidikan, status ilegal lahan menjadi penghambat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Banyak anak-anak yang mengalami kendala administratif saat mendaftar sekolah atau mengakses bantuan pendidikan, yang akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan

di wilayah tersebut. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan dan keterbelakangan sosial di kalangan generasi muda.

Aspek kesehatan masyarakat juga terdampak signifikan. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, kurangnya akses air bersih, serta fasilitas kesehatan yang jauh dari jangkauan memperbesar risiko penyakit menular. Masyarakat yang sakit sering kali tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu karena keterbatasan finansial maupun birokrasi administratif terkait identitas tempat tinggal.

Dari aspek psikologis, rasa tidak aman yang terus-menerus dirasakan oleh masyarakat menciptakan tekanan mental yang tinggi. Hidup dalam ketidakpastian mempengaruhi kesehatan jiwa mereka, menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan, dan rasa putus asa. Akibatnya, produktivitas masyarakat menurun dan harapan untuk memperbaiki taraf hidup menjadi semakin kecil, memperparah kondisi kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Selain itu, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat juga memperlihatkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan hidup mereka. Dengan pendapatan yang tidak menentu dan tingginya biaya hidup, banyak keluarga yang akhirnya mengambil jalan pintas seperti bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum atau menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja tambahan.

Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang minim fasilitas dasar juga memperburuk kerentanan terhadap bencana. Permukiman yang tidak terencana di sepanjang rel kereta api atau bantaran sungai meningkatkan risiko kecelakaan, banjir, dan kebakaran, yang semuanya berdampak serius pada kesejahteraan fisik dan material masyarakat.

Dalam hal akses terhadap program bantuan sosial pemerintah, status ketidakresmian tempat tinggal menjadi hambatan besar. Banyak masyarakat yang tidak tercatat secara administratif sehingga tidak dapat menikmati berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan kesehatan gratis, memperparah kondisi ketidaksetaraan.

Di sisi lain, ketidakpastian kepemilikan lahan juga menghambat pembangunan komunitas secara jangka panjang. Minimnya investasi sosial dalam

bentuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan membuat kawasan ini terus berada dalam lingkaran kemiskinan dan keterpinggiran.

Berdasarkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multisektor dalam menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di lahan PT. Kereta Api Indonesia. Pemerintah, BUMN, serta lembaga sosial perlu berkolaborasi dalam merumuskan solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir